

RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025**

Jl. Besar Perupuk Dusun V
Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Pesisir

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.

Rencana kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Dalam RENJA-OPD tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun. Dalam melaksanakan RENJA-OPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal, pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

RENJA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 menggambarkan rencana kerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2025. Rencana Kerja merupakan sasaran yang ingin dicapai selain diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam tahun 2025, mencakup pula pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya tidak direncanakan. Analisis dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara



NUR RAHMAN, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c
NIP. 19720617 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU 7	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Batubara	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara	20
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja KPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial PPPA	40
3.3 Usulan Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	53
PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam waktu 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek atau 1 (satu) tahunan (RKPD).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Otonom Baru dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Kabupaten Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Kabupaten Batu Bara yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah merupakan rencana tahunan yang berjangka 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RDP) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Sebagai panduan masa depan, maka perencanaan harus memiliki kejelasan urutan waktu pengalokasian suatu sumber daya (untuk memenuhi suatu kebutuhan) mana sumber daya yang dialokasikan tahun pertama, kedua dan seterusnya. Dengan adanya pertimbangan urutan alokasi sumber daya ini, maka efisiensi sumber daya dan efektivitas pemenuhan kebutuhan dapat terjamin.

Rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan

sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu tersebut serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal.

Proses penyusunan Rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Batu Bara dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPD, RKPD dan Renstra). Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Misi dan Visi yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara berupaya melaksanakan program-program yang berwujud pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan daerah Kabupaten Batu Bara.

Isu penting dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tiga tahun kedepan di Kabupaten Batu Bara tetap pada penanganan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berbagai program pemerintah terus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, namun jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum dapat diturunkan secara signifikan, dan pada kenyataannya terus menunjukkan gejala peningkatan. Peningkatan jumlah atau persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada beberapa tahun terakhir ini ternyata disebabkan oleh jumlah penduduk miskin yang terdiri dari mereka yang kurang keberdayaannya, sehingga memerlukan upaya peningkatan dalam penanganan permasalahan tersebut.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara menetapkan Rencana Kerja Tahun 2025 yang berisi tujuan, sasaran serta pencapaian tujuan dengan melalui kebijakan program dengan tetap memperhitungkan potensi dan kendala serta mengantisipasi tuntutan perkembangan masa depan.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara menetapkan Rencana Kerja disusun melalui proses yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan pemerintahan daerah sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kabupaten Batu Bara yang berorientasi pada pencapaian tujuan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun 2025 didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 I-8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040;
19. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
20. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikator dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L, dan Renja Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Mengambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Sebelumnya

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan Rencana Program/Kegiatan tahun 2024. Penyusunan Rencana Program/Kegiatan tahun 2025 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2023. Pencapaian Target 2023 sebesar Rp.10.668.618.585,- Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara difokuskan pada pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023 diuraikan menurut kegiatan dengan mengukur capaian indikator outputnya. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Batu Bara. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah :

Kode	Uraian/Detail Uraian Kegiatan/Detail Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan per unit	Target Kinerja Output Program (Rencana Pelaksanaan Gedung dan Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Output Program dan Kegiatan per Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (%)			Realisasi Realisasi Kinerja Target Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022		
					Target Kinerja Output Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Kinerja Output Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (%)	9	10 (%)	11 (%)
00.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyuplai Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Uraian Pemerintahan Daerah	10	0	0	-	0	0	0	0
00.01.2.01.01	Pengadaan Makanan Dinas Operasional atau Layanan	Jumlah Unit Makanan Dinas Operasional atau Layanan yang Disediakan	10	0	0	-	0	0	0	0
00.01.2.02	Penyediaan Jasa Penyuplai Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Penyuplai Uraian Pemerintahan Daerah	30	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.01	Penyediaan Jasa Suku Merusak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Suku Merusak	100	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.02	Penyediaan Jasa Konsultasi, Desain, Draft Ar. dan Lain-lain	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Konsultasi, Desain Draft Ar. dan Lain-lain yang Disediakan	10	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.03	Penyediaan Jasa Pemecatan dan Pengembangan Ketenag.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemecatan dan Pengembangan Ketenag. yang Disediakan	10	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.04	Penyediaan Jasa Dinas Uraian Ketenag.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dinas Uraian Ketenag. yang Disediakan	10	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyuplai Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penyuplai Uraian Pemerintahan Daerah	30	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.03.01	Pengadaan Jasa Pemerintahan, Ketenag. Pemerintahan dan Perek. Ketenag. Penyuplai Uraian Dinas atau Ketenag. Dinas Jabatan	Jumlah Makanan Penyuplai Uraian Dinas atau Ketenag. Dinas Jabatan yang Disediakan dan Disediakan Perek. Uraian	0	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Uraian/Detail Uraian Kegiatan/Target dan Indikator/Target Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/Materi Pokok	Target Kinerja (Output) Program (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) dan Tahun 2022	Pencapaian Target Kinerja (Output) Program dan Kegiatan di Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Pencapaian Realisasi Kinerja Target Kinerja Program dan Kegiatan dan Tahun Realisasi		
					Target Kinerja dan Kegiatan Tahun 2022	Pencapaian Kinerja dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Rencana Tahun 2022)	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(1/5)	9	10(1/4/5)	11(1/5/10)
05.01.1.01	Pembinaan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terbatas, Anak Terbatas, Lanjut Usia Terbatas, serta Gelandangan Pengemis di Loka Pemb. Sosial	Pembinaan PMAS yang memperoleh bantuan sosial	30		30.00	30.71	35.42	30	30	100
05.01.1.01.01	Pengabdian Sosial Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Asil Bantu dan Asil Bantu Program Sosial Keluhan-Keluhan: 4000 orang	100		100	100	100	0	0	0
05.01.1.01.02	Pembinaan Sosial Dasar kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terbatas, Anak Terbatas, Lanjut Usia Terbatas, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial secara tatap muka Penyandang Disabilitas Terbatas, Anak Terbatas, Lanjut Usia Terbatas, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat: 4000 orang	1400		1400	1400	100	1400	1400	100
05.01.1.01.03	Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kesehatan: 4000 orang	100		100	11	11.00	0	0	0
05.01.1.01.04	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga: 4000 orang	1000		1000	1000	100.00	0	0	0
05.01.1.02	Pembinaan Sosial Penyandang Masalah Kepribadian Sosial (PMKS) Lanjut Usia dan PMKS di Loka Pemb. Sosial	Pembinaan PMKS Lanjut yang memperoleh bantuan sosial	30		30.00	37.86	112.86	30	30	100

Kode	Uraian/Detail Uraian Pengeluaran Dana dan Anggaran/Revisi Subprogram	Indikator Kinerja Program (output) - Maksimal per unit	Target Kinerja Output Program (Rencana Pelaksanaan Operasi) 2022 (Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Output Program dan Anggaran 2022 (Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2022 (Rp)			Realisasi Realisasi Kinerja Target Kinerja Program dan Anggaran 2022 (Rp)		
					Target Kinerja Output Program (Rencana Pelaksanaan Operasi) 2022 (Tahun 2022)	Realisasi Kinerja Output Program (Rencana Pelaksanaan Operasi) 2022 (Tahun 2022)	Target Realisasi (%)	Target Program dan Anggaran (Rencana Pelaksanaan Operasi) 2022 (Tahun 2022)	Realisasi Program dan Anggaran 2022 (Tahun 2022)	Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05.04.2.02.01	Penyediaan Layanan Tesis dan Pengabdian Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Tesis dan Pengabdian Masyarakat	200	180	2016	139.60	0	0	0	0
05.04.2.02.02	Penyediaan Peminatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Peminatan	20000	7000	7000	100	0	0	0	0
05.04.2.02.03	Penyediaan Bimbingan Tesis, Matrik, Skripsi dan Karya Ilmiah	Jumlah Peserta Bimbingan Tesis, Matrik, Skripsi dan Karya Ilmiah	200	7	4	57.14	7	7	100	100
05.04.2.02.04	Kejuruteraan Lulusan dan Pembinaan dalam Pendidikan Berprestasi	Jumlah Lulusan yang Mendapatkan Pembinaan dalam Pendidikan Berprestasi	2	1	1	100	0	0	0	0
0.05	PELOPORAN KEMAJUAN DAN PENGEMBANGAN (KEMAJUAN)	Jumlah orang yang Mendapatkan Kemajuan dan Pengembangan	100000	22000	22000	11.14	70	70	100	100
05.05.2.01	Pembinaan Anak-anak Tahanan	Jumlah anak tahanan yang Mendapatkan Pembinaan	100	148	138	86.48	0	0	0	0
05.05.2.01.01	Pembinaan Anak-anak Tahanan	Jumlah Anak-anak Tahanan yang Mendapatkan Pembinaan	25	30	4	14.27	0	0	0	0
05.05.2.01.02	Pembinaan Anak-anak Tahanan	Jumlah Anak-anak Tahanan yang Mendapatkan Pembinaan	100	118	134	100	0	0	0	0

Kode	Uraian/Detail Uraian Pembelajaran Capaian dan Indikator/Aspek Subprogram	Indikator Kinerja Program (output)/ Matriks pen- jutan	Target Kinerja Output Program (Rencana Peningkatan Output) 2021	Pencapaian Target Kinerja Output Program dan Indikator 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Indikator Tahun 2022			Pencapaian Realisasi Kinerja Target Kinerja Program dan Indikator 2022		
					Target Kinerja Output Program 2022	Pencapaian Target Output Program 2022	Target Realisasi (%)	Target Program dan Indikator Kinerja Tahun 2022	Pencapaian Program dan Indikator 2022	Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(=7/6)	9	10(=9/8)	11(=10/9)
3.08.07	2021/2022 Peningkatan Kualitas AKM	Peningkatan Peningkatan Kualitas AKM	100		100	92,32	92,32	100	100	100
3.08.07.2.01	Peningkatan Layanan AKM yang Meningkatkan Peningkatan Kualitas yang Meningkatkan Kualitas Tingkat Kualitas Akademik AKM	Jumlah Layanan yang yang meningkatkan peningkatan Kualitas	1		1	1	100	1	1	100
3.08.07.2.01.01	Peningkatan Layanan Peningkatan Kualitas yang Meningkatkan Peningkatan Kualitas Tingkat Kualitas Akademik	Jumlah Layanan yang Meningkatkan Peningkatan Kualitas Meningkatkan Layanan Peningkatan Kualitas Akademik	10		10	10	92,52	10	10	100
3.08.07.2.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Peningkatan Kualitas yang Meningkatkan Peningkatan Kualitas Meningkatkan Kualitas Akademik	Jumlah Layanan yang Layanan Peningkatan yang Meningkatkan Kualitas dan Peningkatan yang AKM yang Meningkatkan Peningkatan Kualitas Meningkatkan Kualitas Akademik	10		1	1	100	1	1	1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penerapan SPM bidang Sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial yang harus diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti
- Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota.

Untuk lebih jelas, capaian SPM Bidang sosial dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

No	Indikator	Satuan	Capaian Target				Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial	%	9,08	8,59	15,61	99,23	100	100
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	%	34,58	74,76	100	95,52	100	100
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	%	11,07	9,23	19,68	98,33	100	100
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	%	25,77	15	57,31	98,33	100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.	%	100	100	100	100	100	100

Selain SPM, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melaksanakan pembangunan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran OPD. Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan sasaran strategis tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	Nilai	BB (76,00)	BB (72,76)	97,01 %
2	Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	Orang	250	86	26,40 %
		Persentase Angka Kemiskinan	%	11,28	11,38	99,12 %
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	2,91	5,72	50,87 %
4	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Ratio Kekerasan Terhadap Anak	%	15,70	23,45	66,95 %
		Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	%	61 Madya	50,23 Pratama	82,34 %

Dari data tabel diatas, dapat diuraikan beberap hal sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP OPD. Pada Tahun 2023 Capaian indikator adalah 72,76 atau BB.
- Indikator Kinerja Utama Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri. Pada Tahun 2023 capaian indikator ini adalah 26,40 %
- Indikator Kinerja Utama Persentase Angka Kemiskinan. Pada Tahun 2023 capaian indikator ini adalah 99,12 %.
- Indikator Kinerja Utama Ratio Kekerasan terhadap Perempuan. Pada tahun 2023 capaian indikator ini adalah 50,87 %.
- Indikator Kinerja Utama Ratio Kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2023 capaian indikator ini adalah 66,95 %
- Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak. Pada tahun 2023 capaian indikator ini adalah 82,34 %.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara berkewajiban dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berikut disajikan kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2020 – 2023.

Tabel 2.4
Perkembangan Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tahun 2020 - 2022

No	Jenis PMKS	2020	2021	2022	2023
1	Anak Balita Terlantar	28	16	1	3
2	Anak Terlantar	347	103	45	36
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	38	3	46	29
4	Anak Jalanan	12	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas	85	349	278	183
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	38	-	19	-
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	3	3	-
8	Lanjut Usia Terlantar	1.671	1.293	1.016	2.897
9	Penyandang Disabilitas	1.451	1.397	1.281	1.279
10	Tuna Susila	4	6	-	-
11	Gelandangan	27	5	1	1
12	Pengemis	70	15	9	6
13	Pemulung	73	83	72	52
14	Kelompok Minoritas	-	24	3	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP)	60	20	50	47
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	5	1	1
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	116	6	4	4
18	Korban Trafficking	-	1	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	6	-	-
21	Korban Bencana Alam	912	7.388	3.197	48
22	Korban Bencana Sosial	-	5	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE/MARSE)	2.730	3.617	5.899	4.890
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	61	5	10	10
25	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-
26	Fakir Miskin	66.942	46.522	39.858	56.410
Total		74.665	60.880	51.793	65.728

Sumber: Dinas Sosial PPPA

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sangat ditentukan oleh berbagai faktor, baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi proses pelayanan rehabilitasi sosial. Faktor-faktor tersebut berupa isu-isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, antara lain :

1. Perlu pengawasan dan pembinaan komprehensif terhadap anak terlantar, gelandangan dan pengemis penduduk Kabupaten Batu Bara dan luar Kabupaten Batu Bara.

2. Penyaluran permakanan terhadap lanjut usia dilaksanakan secara berkelanjutan.
3. Peningkatan kemampuan SDM dalam penanganan bencana dan pasca bencana.
4. Memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pengarusutamaan gender.
5. Pelatihan keterampilan bagi perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga.
6. Memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. Melakukan kampanye pencegahan pernikahan usia anak.
8. Melakukan sosialisasi dan pembentukan sekolah ramah anak.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Masih banyaknya anak terlantar, gelandangan dan pengemis penduduk Kabupaten Batu Bara dan luar Kabupaten Batu Bara.
2. Masih kurangnya pendampingan dan fasilitasi terhadap lanjut usia miskin dan rentan miskin.
3. Masih kurangnya keterampilan SDM dalam penanganan bencana dan pasca bencana.
4. Kurangnya implementasi tentang kesetaraan gender.
5. Rendahnya keterampilan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
6. Masih tingginya kekerasan terhadap anak.
7. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
8. Belum semua sekolah termasuk kategori ramah anak.

Permasalahan tersebut di atas dapat diberikan solusi dengan upaya-upaya berikut:

1. Penanganan permasalahan sosial dengan menggunakan skala prioritas.
2. Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan.
3. Optimalisasi proses perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.
4. Melibatkan peran aktif masyarakat, orsos, ormas, pihak swasta dan pihak-pihak peduli terhadap pembangunan bidang sosial.

2.4. Review Terhadap Rancangan OPD

Dari Rancangan yang telah disusun pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja dinas. Rencana kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Di samping itu,

dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

TABEL 2.8
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2028
KABUPATEN BATU BARA

No.	KOTA KINERJA 2028						KOTA KINERJA 2028						Kategori Peningkatan
	Program Kegiatan	Indikator	Substansi Kinerja	Target Peningkatan		Penganggaran (Rp.)	Program Kegiatan	Indikator	Substansi Kinerja	Target Peningkatan		Penganggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URUSAN KEPERATURANAN KUALITAS PENGALAMAN WISATA DI KABUPATEN BATU BARA						URUSAN KEPERATURANAN KUALITAS PENGALAMAN WISATA DI KABUPATEN BATU BARA						
	URUSAN KEPERATURANAN KUALITAS PENGALAMAN WISATA DI KABUPATEN BATU BARA						KEPERATURANAN PENGALAMAN WISATA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2028 KABUPATEN BATU BARA						
	KEPERATURANAN PENGALAMAN WISATA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2028		Kemampuan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pemerataan layanan	100	%	3.000.000.000	Kemampuan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pemerataan layanan pemerintah kabupaten Batubara	Kualitas, Kuantitas Baru	Kemampuan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pemerataan layanan pemerintah kabupaten Batubara	100	%	3.000.000.000	
	Kemampuan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pemerataan layanan pemerintah kabupaten Batubara		Kemampuan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pemerataan layanan pemerintah kabupaten Batubara	6	Indikator	17.700.000	Kemampuan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pemerataan layanan pemerintah kabupaten Batubara	Kualitas, Kuantitas Baru	Kemampuan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pemerataan layanan pemerintah kabupaten Batubara	6	Indikator	17.700.000	
	Pengembangan Taman Rekreasi Pemerataan Pemerataan Pemerataan	Kualitas, Kuantitas Baru	Kemampuan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pemerataan layanan pemerintah kabupaten Batubara	2	Indikator	3.000.000	Pengembangan Taman Rekreasi Pemerataan Pemerataan Pemerataan	Kualitas, Kuantitas Baru	Kemampuan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pemerataan layanan pemerintah kabupaten Batubara	2	Indikator	3.000.000	

Kode	KENDARAAN BOPD					KEND. MELAKUKI BOPD/SPBP					Jumlah Ruang	
	Program/Instansi	Lokasi	Indikator Kinerja	Ruang Tujuan		Kapasitas (Rm)	Program/Instansi	Lokasi	Indikator Kinerja	Ruang Tujuan		
				1	2					1		2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Rengasidhar-Bahan Logistik Karet	Kab. Batu Batu	Jumlah Paket Baku Logistik Karet yang dikirimkan	1	aktif	60.000.000	Rengasidhar-Lokasi Pengiriman Karet	Kab. Batu Batu	Jumlah Paket Baku Logistik Karet yang dikirimkan	1	aktif	60.000.000
	Rengasidhar-Ruang Gudang dan Pengemasan	Kab. Batu Batu	Jumlah Paket Ruang Gudang dan Pengemasan yang dikirimkan	1	aktif	20.000.000	Rengasidhar Gudang dan Ruang Pengemasan Karet	Kab. Batu Batu	Jumlah Paket Ruang Gudang dan Pengemasan yang dikirimkan	1	aktif	20.000.000
	Rengasidhar-Bahan Baku dan Ruang Pengemasan	Kab. Batu Batu	Jumlah Paket Bahan Baku dan Ruang Pengemasan Gudang yang dikirimkan	1	aktif	100.000.000	Rengasidhar Bahan dan Ruang Pengemasan Karet	Kab. Batu Batu	Jumlah Paket Bahan Baku dan Ruang Pengemasan Gudang yang dikirimkan	1	aktif	100.000.000
	Rengasidhar-Ruang Gudang dan Pengemasan BOPD	Kab. Batu Batu	Jumlah Laporan Pengembangan Ruang Gudang dan Pengemasan BOPD	10	aktif	200.000.000	Pengembangan Ruang Gudang Karet	Kab. Batu Batu	Jumlah Laporan Pengembangan Ruang Gudang dan Pengemasan BOPD	10	aktif	200.000.000
	Rengasidhar Ruang Baku Karet Ruang Gudang dan Pengemasan Karet		Jumlah Rengasidhar Ruang Baku Karet Ruang Gudang dan Pengemasan Karet	1	aktif	20.000.000	Rengasidhar Ruang Baku dan Pengemasan	Kab. Batu Batu	Rengasidhar Ruang Baku Ruang Gudang dan Pengemasan Karet	1	aktif	20.000.000
	Pengembangan Ruang dan Gudang Pengemasan dan Pengemasan	Kab. Batu Batu	Jumlah Laporan Pengembangan Ruang dan Gudang Pengemasan dan Pengemasan yang dikirimkan	1	aktif	40.000.000	Pengembangan Ruang dan Gudang Pengemasan dan Pengemasan yang dikirimkan	Kab. Batu Batu	Jumlah Laporan Pengembangan Ruang dan Gudang Pengemasan dan Pengemasan yang dikirimkan	1	aktif	40.000.000
	Rengasidhar-Lokasi Pengiriman Karet Pengemasan Karet		Jumlah Lokasi Pengiriman Karet Pengemasan Karet Pengemasan Karet	10	aktif	1.000.000.000	Rengasidhar-Lokasi Pengiriman Karet Pengemasan Karet Pengemasan Karet	Kab. Batu Batu	Jumlah Lokasi Pengiriman Karet Pengemasan Karet Pengemasan Karet	10	aktif	1.000.000.000



No.	KENDARAAN BENCANA					KENDARAAN NON BENCANA					Jumlah Kendaraan	
	Program Kegiatan	Unit	Indikator Kinerja	Ruang Lingkup	Kapabilitas (Rp.)	Program Kegiatan	Unit	Indikator Kinerja	Ruang Lingkup	Kapabilitas (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana Aliran Lokal	Sub Bata Bata	Jumlah Laporan Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana Aliran Lokal yang Terselesaikan	1	Rencana	10.000.000	Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana Aliran Lokal	Sub Bata Bata	Jumlah Laporan Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana Aliran Lokal yang Terselesaikan	1	Rencana	10.000.000
	Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana	Sub Bata Bata	Jumlah Laporan Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana yang Terselesaikan	1	Rencana	10.000.000	Program Kendaraan, Bantuan Dana Aliran Lokal yang Terselesaikan	Sub Bata Bata	Jumlah Laporan Program Unit Kendaraan Bantuan Dana yang Terselesaikan	1	Rencana	10.000.000
	Kendaraan Bantuan Kendaraan Kendaraan Kendaraan		Jumlah Mobil Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	10	Kendaraan	20.000.000	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Sub, Bata Kendaraan	Jumlah Mobil Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	10	Kendaraan	20.000.000
	Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana Aliran Lokal yang Terselesaikan	Sub Bata Bata	Jumlah Laporan Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana Aliran Lokal yang Terselesaikan	1	Kendaraan	10.000.000	Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana Aliran Lokal	Sub Bata Bata	Jumlah Laporan Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana Aliran Lokal yang Terselesaikan	1	Kendaraan	10.000.000
	Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana Aliran Lokal yang Terselesaikan	Sub Bata Bata	Jumlah Laporan Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana Aliran Lokal yang Terselesaikan	10	Kendaraan	20.000.000	Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana Aliran Lokal	Sub Bata Bata	Jumlah Laporan Program Unit Kendaraan, Bantuan Dana Aliran Lokal yang Terselesaikan	10	Kendaraan	20.000.000
1	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN		Jumlah Mobil Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	10	Kendaraan	20.000.000	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Sub, Bata Kendaraan	Jumlah Mobil Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	10	Kendaraan	20.000.000

Kode	KEMERDIAAN KONG					KEMERDIAAN KONG/ROK					Catatan Keterangan		
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Penganggaran (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Penganggaran (Rp.)			
												1	2
	Kepengawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan		Indikator KEMERDIAAN KONG yang terdapat program penganggaran	10	100%	200.000.000	Kepengawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan		Indikator KEMERDIAAN KONG yang terdapat program penganggaran	10	100%	200.000.000	
	Kepengawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan	Kawasan Kawasan	Indikator KEMERDIAAN KONG yang terdapat program penganggaran	10	100%	200.000.000	Kepengawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan	Kawasan Kawasan	Indikator KEMERDIAAN KONG yang terdapat program penganggaran	10	100%	200.000.000	
	Kepengawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan	Kawasan Kawasan	Indikator KEMERDIAAN KONG yang terdapat program penganggaran	10	100%	200.000.000	Kepengawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan	Kawasan Kawasan	Indikator KEMERDIAAN KONG yang terdapat program penganggaran	10	100%	200.000.000	
1	KEMERDIAAN KONG KONG		Kepengawasan KONG yang terdapat program penganggaran	10	100%	200.000.000	Kepengawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan	Kawasan Kawasan	Kepengawasan KONG yang terdapat program penganggaran	10	100%	200.000.000	
	Kepengawasan KONG yang terdapat program penganggaran		Kepengawasan KONG yang terdapat program penganggaran	10	100%	200.000.000	Kepengawasan KONG yang terdapat program penganggaran		Kepengawasan KONG yang terdapat program penganggaran	10	100%	200.000.000	

[illegible]

No.	Kategori: KEMUKAAN KEMUKAAN					Kategori: KEMUKAAN KEMUKAAN					Catatan Keterangan		
	Program/Program		Indikator Kinerja	Target/Target		Maksimal (Rp.)	Program/Program		Indikator Kinerja	Target/Target		Maksimal (Rp.)	
	1	2		3	4		7	8		9			10
1	Program/Program KEMUKAAN KEMUKAAN		Kemudahan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan	100	100	100.000.000	Program/Program KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN	Kemudahan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan	100	100	100.000.000		
2	Program/Program KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN		Kemudahan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan	100	100	100.000.000	Program/Program KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN	Kemudahan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan	100	100	100.000.000		
3	Program/Program KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN		Kemudahan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan	100	100	100.000.000	Program/Program KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN	Kemudahan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan	100	100	100.000.000		
4	Program/Program KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN		Kemudahan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan	100	100	100.000.000	Program/Program KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN	Kemudahan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan	100	100	100.000.000		
5	Program/Program KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN		Kemudahan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan	100	100	100.000.000	Program/Program KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN KEMUKAAN	Kemudahan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan	100	100	100.000.000		

No.	KEMERDEHAAN KENDARAAN					KEMERDEHAAN KENDARAAN					Catatan Kendaraan
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Kategori Kendaraan	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Kategori Kendaraan	Kategori Kendaraan		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	URUSAN KEMERDEHAAN KENDARAAN TANPA SPESIFIKASI KENDARAAN DARI 100000 KENDARAAN					URUSAN KEMERDEHAAN KENDARAAN TANPA SPESIFIKASI KENDARAAN DARI 100000 KENDARAAN					
	URUSAN KEMERDEHAAN KENDARAAN KEMERDEHAAN KENDARAAN DARI 100000 KENDARAAN					KEMERDEHAAN KENDARAAN KEMERDEHAAN KENDARAAN DARI 100000 KENDARAAN					
8	URUSAN KEMERDEHAAN KENDARAAN KEMERDEHAAN KENDARAAN DARI 100000 KENDARAAN		KEMERDEHAAN KENDARAAN KEMERDEHAAN KENDARAAN DARI 100000 KENDARAAN		URUSAN KENDARAAN DARI 100000 KENDARAAN	URUSAN KEMERDEHAAN KENDARAAN KEMERDEHAAN KENDARAAN DARI 100000 KENDARAAN					
	KEMERDEHAAN KENDARAAN KEMERDEHAAN KENDARAAN DARI 100000 KENDARAAN		KEMERDEHAAN KENDARAAN KEMERDEHAAN KENDARAAN DARI 100000 KENDARAAN		URUSAN KENDARAAN DARI 100000 KENDARAAN	URUSAN KEMERDEHAAN KENDARAAN KEMERDEHAAN KENDARAAN DARI 100000 KENDARAAN					

[illegible]

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial sangatlah membutuhkan perencanaan yang terencana, terukur dan terarah, dan hal ini telah dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

Untuk itu juga diperlukan pemetaan pendataan dan penelaahan yang dilakukan dalam satu tahun berjalan untuk dijadikan bahan perbandingan maupun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan.

Adanya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang cukup dan akurat adalah merupakan dasar penyusunan program dan kegiatan untuk tahun bersangkutan dan berhubungan dengan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Batu Bara maupun APBD Provinsi Sumatera Utara atau dana dari APBN.

Dukungan partisipatif dari berbagai pihak dan organisasi sosial lainnya, seperti pelaku usaha, Orsos, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Forum Komunikasi Lanjut Usia, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta kelompok masyarakat Kabupaten Batu Bara sangat diharapkan untuk ikut bersama-sama membantu dan memecahkan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Yaitu dengan memberikan usulan-usulan bersifat positif yang dapat mengurangi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dapat mencapai sasaran yang tepat dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Musrenbang tingkat Desa
2. Musrenbang tingkat Kecamatan
3. Musrenbang Tingkat Kabupaten
4. Musrenbang Tingkat Provinsi
5. Informasi dari masyarakat, PSM, Orsos, Ormas serta instansi lain tentang permasalahan sosial yang terjadi
6. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

7. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Kementerian Sosial RI untuk melaksanakan kegiatan dan programnya di Kabupaten Batu Bara.
8. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepada pihak swasta, masyarakat, PSM, Ormas, Tagana dan Orsos dan pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan sosial.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara

Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Beban/ Volume	Catatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Batu Bara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Batu Bara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batu Bara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Batu Bara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	

Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Batu Bara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Batu Bara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Batu Bara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Batu Bara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Batu Bara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	1 unit	
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Batu Bara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Batu Bara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Batu Bara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Batu Bara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Batu Bara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKS) yang mengikuti program pemberdayaan	12 orang	

Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah P SKS yang mengikuti program pemberdayaan	12 orang	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelenmbagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	50%	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantl Sosial		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50%	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Batu Bara	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Mr X: 27 Orang Layanan Kedaruratan 100 orang Sandang 100 Orang	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Batu Bara	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Alat Bantu 200 Orang Wase 2.136 orang LKS 10 Unit BKKGS 1.200 orang	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantl Sosial		Persentase PMKS Lainnya yang memperoleh bantuan sosial	50%	
1.06.04.2.02.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Batu Bara	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PMKS 66 orang PKH 71 orang Takar BPNT 37 orang Opr SIKSNG 163 orang	

Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase masyarakat korban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase masyarakat korban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Kab. Batu Bara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kelelapagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terhadap kelelapagaan bencana	26 orang	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Batu Bara	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 orang	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DA SAR				
2.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.06.02	PROGRAM PENGARU SUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Terlaksananya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	80 %	
2.06.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	80 %	
2.06.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Batu Bara	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	3 organisasi	
2.06.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		Jumlah Lembaga dan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	3 lembaga	

Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
	Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.06.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3 Lembaga	
2.06.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	
2.06.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan layanan	40 keluarga	
2.06.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Yang Menertima Layanan Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	40 orang	
2.06.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Jumlah sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	
2.06.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak	80%	
2.06.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yg mendapat pelatihan KHA	1 lembaga	
2.06.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	15 organisasi	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional disusun dan dijabarkan kedalam visi pembangunan Indonesia Jangka Panjang sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 yaitu "Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur", dan visi pembangunan jangka menengah Indonesia yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan diarahkan kepada kebijakan kualitas, perlindungan dan penanggulangan masalah-masalah sosial melalui :

1. Perhatian terhadap masalah kualitas perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem perlindungan sosial yang terpadu, yang mampu menjangkau seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi serta bantuan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Meningkatkan peran serta berbagai komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
4. Mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mendukung penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara yang akan dicapai tahun 2024-2026 adalah:

1. Terciptanya Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Perlindungan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Menurunkan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD
2. Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
4. Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak.

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target		
					2024	2025	2026
1.	Teroptinya Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	BB	BB	A
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang terlayani	Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	200	250	300
				Persentase Angka Kemiskinan	10,77	10,26	9,75
3.	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2,79	2,09	1,39
			Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	22,00	20,00	18,00
				Nilai Evaluasi KLA	700	800	850

3.3. Usulan Program dan Kegiatan

Visi RPJPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : **"Kabupaten Batu Bara Sebagai Daerah Industri, Perdagangan Dan Jasa, Serta Pertanian Yang Beriman, Mandiri, Maju Dan Sejahtera Berjaya"**

Dalam upaya mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2005 - 2025 tersebut, maka misi RPJPD Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, cerdas, kreatif dan produktif;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
3. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing serta meningkatkan rasa aman masyarakat;
4. Mewujudkan Pelayanan Prasarana dan Sarana yang Memadai dan Berkualitas guna menunjang kegiatan ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Asri dan Lestari;

6. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan

Berkaitan dengan RPJPD Kabupaten Batu Bara tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara berkaitan dengan misi Ketiga yaitu: **Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing serta meningkatkan rasa aman masyarakat.**

Berikut disampaikan usulan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022
dan Prakiraan Mula Tahun 2022
Kabupaten Batu Bara

Kode	Uraian Bidang Usaha Pemberdayaan Sosial dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Dua/mes) Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Ciri-ciri Peningkat	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2022	
			Luas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Prag Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Prag Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PENCANTIKAN BAJU YANG SERKATIN DENGAN PELAYANAN SASAB								
1.02	URUSAN PENCANTIKAN SISWA SOSIAL								
1.02.01	PROSEDUR PENCANTIKAN URUSAN PENCANTIKAN DOKUMEN KABUPATEN KOTA	Persentase pemenuhan kegiatan, dan/atau proses pemenuhan kegiatan		100%	0.070.770.479			100%	0.039.347.046
1.02.01.3.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Eksekusi Kinerja Peningkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Eksekusi Kinerja Peningkat Daerah		8 dokumen	17.740.000			8 dokumen	17.610.000
1.02.01.3.01.01	Persiapan Dokumen Perencanaan Peningkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkat Daerah	800 Batu Bara	2 dokumen	6.677.000	Dana Daerah Indikat (DAI)		2 dokumen	6.672.000
1.02.01.3.01.02	Koordinasi dan Pembinaan Laporan Capaian Kinerja dan Sistem Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Sistem Rencana Kinerja (RKP) dan Laporan (RKP)	800 Batu Bara	7 dokumen	7.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		7 dokumen	7.000.000

Kode	Unsur/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/Ragunan	Indikator Kinerja Program (Output/Keluaran) (Output)	Berkas Tahun 2025				Ceklist Penting	Pencapaian Masi Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Tujuan Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Pagi Indikator	Sumber Data		Tujuan Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Pagi Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kelapa SePD	Kendaraan Persewaan Layanan Capaian Kinerja dan Indikator Daerah Kelapa SePD							
1.02.04.2.02	Administrasi Keuangan Berpengkai Daerah	Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Keuangan		400%	3.600.000.000			400%	3.600.000.000
1.02.04.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Membayar Gaji dan Tunjangan ASN	Rak. Baku Baku	28 orang	3.000.000.000	Data Akutasi Umum (DAU)		28 orang	3.000.000.000
1.02.04.2.02.02	Kontribusi Pengeluaran dan Keuangan Kala Tahun SePD	Jumlah Laporan Keuangan Akutasi Tahun SePD dan Laporan Keuangan Persewaan Layanan Capaian Kinerja Tahun SePD	Rak. Baku Baku	1 laporan	3.000.000	Data Akutasi Umum (DAU)		1 laporan	3.000.000
1.02.04.2.02	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pemerintahan Administrasi Umum Pemerintah Daerah		12 Bulan	270.000.000			12 Bulan	270.000.000
1.02.04.2.02.04	Penyediaan dan Pengelolaan Pengelolaan Anggaran Kantor	Jumlah Paket Pengelolaan Anggaran Kantor yang Pengelolaan	Rak. Baku Baku	1 paket	12.000.000	Data Akutasi Umum (DAU)		1 paket	12.000.000
1.02.04.2.02.05	Penyediaan dan Pengelolaan Pengelolaan Kantor	Jumlah Paket Pengelolaan Kantor yang Pengelolaan	Rak. Baku Baku	1 paket	12.000.000	Data Akutasi Umum (DAU)		1 paket	12.000.000
1.02.04.2.02.06	Penyediaan dan Pengelolaan Pengelolaan Kantor	Jumlah Paket Pengelolaan Kantor yang Pengelolaan	Rak. Baku Baku	1 paket	12.000.000	Data Akutasi Umum (DAU)		1 paket	12.000.000

Kode	Uraian/Bidang Usaha Pemeliharaan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2015				Ceklist Pening	Prestasi Maju Rencana Tahun 2015	
			Lokasi	Tujuan Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Paga Indikator	Sumber Data		Tujuan Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Paga Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bantuan dan Pendirian Pusat-pusat kesehatan	Bantuan dan Pendirian Pusat-pusat kesehatan yang berkualitas	Batu Batu		100.000.000	Survei (DHS)			111.000.000
1.06.01.1.01.01	Penyediaan dan Konsultasi GPR	Jumlah Laporan Dysentery dan Diare Konsultasi dan Konsultasi GPR	Kab. Batu Batu	12 laporan	500.000.000	Data Akutasi Survei (DHS)		12 laporan	500.000.000
1.06.01.1.01.02	Pengadaan Barang MIX Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang MIX Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 unit	57.000.000			1 unit	57.000.000
1.06.01.1.01.03	Pengadaan Kandang Sapi (Kandang) dan Layanan	Jumlah Unit Kandang Sapi Operasional dan Layanan yang Dibutuhkan	Kab. Batu Batu	1 unit	57.000.000	Data Dag. Hasil (DHS)		1 unit	57.000.000
1.06.01.1.01.04	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	1.012.040.012			12 bulan	1.012.040.012
1.06.01.1.01.05	Pengadaan Jasa Konsultasi, Survei GPR dan 1 unit	Pengadaan Jasa Konsultasi, Survei GPR dan 1 unit yang Dibutuhkan	Kab. Batu Batu	1 laporan	111.000.012	Data Dag. Hasil (DHS) Data Akutasi Survei (DHS)		1 laporan	111.000.012
1.06.01.1.01.06	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Kesehatan	Jumlah Waktu Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Kesehatan yang Dibutuhkan	Kab. Batu Batu	1 laporan	500.000.000	PONDAKTA ATAU (DHS) (DHS)		1 laporan	500.000.000
1.06.01.1.01.07	Pemeliharaan Barang MIX Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang MIX Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	200.010.000			12 bulan	200.010.000

Kode	Uraian/Detail Uraian, Penerimaan Dan/atau Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Hasil/Keluaran) (Output)	Rencana Tahun 2025				Ceklist Pening	Prestasi dan Kinerja Tahun 2024	
			Lokasi	Tingkat Capaian Kinerja	Ketersediaan Data/Peng ukuran	Sumber Data		Tingkat Capaian Kinerja	Ketersediaan Data/Peng ukuran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.1.01.01	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Ruang Pemeliharaan dan Pagar Kandang Pemeliharaan Ternak dan Kandang Ternak	Jumlah Kandang Pemeliharaan Ternak atau Kandang Ternak yang dilengkapi dan dikelola dengan baik	Kab. Batu Baru	1 unit	10.000.000	Data Akademi Umum (DAU)		1 unit	10.000.000
1.01.01.1.01.02	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Ruang Pemeliharaan dan Pagar Kandang Pemeliharaan Ternak dan Kandang Ternak	Jumlah Kandang Ternak Operasional atau Lapangan yang dilengkapi dan dikelola dengan baik	Kab. Batu Baru	32 unit	210.000.000	PENGALAMAN AGRI (PENGAL)		32 unit	210.000.000
1.01.02	PROGRAM PENGUSAHAAN SAKSI	Jumlah Pemasok Saksi Pengawasan Saksi (PERS) yang mengikuti program pemberdayaan		12 orang	200.000.000			12 orang	200.000.000
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pemasok Saksi Pengawasan Saksi	Jumlah PERS yang mengikuti program pemberdayaan		12 orang	200.000.000			12 orang	200.000.000
1.01.02.1.01.01	Pengelolaan Pemasok Saksi Pengawasan Saksi	Jumlah Tenaga Kependidikan Saksi Pengawasan Saksi Kependidikan yang mengikuti Kependidikan Kependidikan	Kab. Batu Baru	12 orang	200.000.000	Data Akademi Umum (DAU)		12 orang	200.000.000
1.01.02.1.01.02	Pengelolaan Pemasok Saksi Pengawasan Saksi	Jumlah Tenaga Kependidikan Saksi Pengawasan Saksi Kependidikan yang mengikuti Kependidikan Kependidikan	Kab. Batu Baru	12 orang	200.000.000	Data Akademi Umum (DAU)		12 orang	200.000.000

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Ragelan	Indikator Kinerja Program (Output dan RAGELAN)	Rencana Tahun 2025				Ceklist Pening	Prestasi dan Pencapaian Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indirect	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keterserapan Dana/Pagu Indirect
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01	Unit Koordinasi Masyarakat Kecamatan Kabupaten Ponorogo	Kepemimpinan Kecamatan Kabupaten Ponorogo							
1.06.01	PROGRAM RDI/AGL/TAJ/ SOCIAL	Pembinaan RMC yang memperoleh bantuan untuk peningkatan ketahanan dasar		50%	2.502.471.600			50%	1.251.235.800
1.06.01.2.01	Kebijakan Sosial Dalam Peningkatan Kualitas Tenaga, Anak Tenaga, Lulusan Ulu Tenaga, serta Pendidikan Peningkatan di Luar Rantai Sosial	Pembinaan RMC yang memperoleh bantuan sosial		50%	2.502.471.600			50%	1.251.235.800
1.06.04.2.04.05	Pembinaan Gerakan Fals. Mener. Sistem. dan Sosial	Jumlah Peserta Gerakan Fals. Mener. Sistem. dan Sosial	Kab. Gowa	10.000 orang	100.000.000	Dana APBD (DAU) yang Diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		10.000 orang	100.000.000
1.06.04.2.07.05	Pembinaan Gerakan Sosial kepada Keluarga Peningkatan Kesejahteraan	Jumlah Peserta Gerakan Sosial kepada Keluarga Peningkatan Kesejahteraan	Kab. Gowa	10.000 orang	100.000.000	Dana APBD (DAU) yang Diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		10.000 orang	100.000.000

Kode	Unitas/Bidang Usaha Pemeliharaan Daerah dan Program Kabupaten	Indikator Kinerja Program (Output/Hasil) Kabupaten (Output)	Bencana Tahun 2025				Ceklist Pening	Prestasi Maju Bencana Tahun 2025	
			Luas	Tingkat Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Paga Indikator	Sumber Data		Tingkat Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Paga Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.2.02	Salah satu Sistem Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban DISKID dan KAPDA di Luar PAKS Daerah	Persentase PMKS Lainnya yang mempunyai rumah sakit		100%	1.437.420.000			100%	1.437.420.000
1.06.01.2.02.01	Pembinaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya Bukan Korban DISKID dan KAPDA	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesehatan, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, serta Gangguan Penglihatan dan Masalah Kesejahteraan Keluarga	Rak. atau Rak	PMKS 16 orang PMK 71 orang Taru SPKT 57 orang Or DISKID 163 orang	1.437.420.000	Data Bagi Hasil DBH- DAS yang dihasilkan Peningkatannya Bimbingan Pembinaan		PMKS 16 orang PMK 71 orang Taru SPKT 57 orang Or DISKID 163 orang	1.437.420.000
1.06.06	PROGRAM PENINGKATAN SDC/ASA	Persentase masyarakat dengan bencana mempunyai perlindungan dan jamban sehat		100%	324.220.000			100%	324.220.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kesejahteraan	Persentase masyarakat dengan bencana mempunyai perlindungan dan jamban sehat		100%	273.791.200			100%	273.791.200
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Bantuan	Jumlah Orang yang mendapatkan Perlindungan (di dalam Mawa Tanggap Darurat) (Peningkatan) Kesejahteraan	Rak. atau Rak	100 orang	273.791.200	PENGALFAN ASLI DAKDAS (PMK) Data Bagi Hasil (DBH)		100 orang	273.791.200



Kode	Uraian/Bidang Usaha Pemeliharaan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Berkas Tahun 2025				Ceklist Pening	Prestasi Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Tujuan Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Paga Indikator	Sumber Data		Tujuan Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Paga Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kepulauan Riau							
1.05.05.2.02	Peningkatan keberdayaan Masyarakat Terhadap Kecelakaan Kawasan Pantai	Jumlah Peningkatan keberdayaan masyarakat terhadap kecelakaan bencana		35 orang	565.762.200			35 orang	395.000.000
1.05.05.2.02.03	Kordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanggap Bencana Kawasan Pantai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tangap Bencana Kawasan Kecelakaan Kepulauan Riau	Kab. Gempal Batu	35 orang	565.762.200	Data Reg. Sosial (DBH)		35 orang	395.000.000
1	URUSAN PENGANTARAN BAJID YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN SASAB								
1.05	URUSAN PENGANTARAN SIKAP PENGORBATAN KORUPSI DAN PELINDUNGAN ANAK								
1.05.02	PROGRAM PENGAROGUTAMAKAN GENDER DAN PENGORBATAN KORUPSI	Pelaksanaan Tertanamnya Penguasaan Gender dan Pembangunan Pelayanan			573.201.000				625.400.000



Kode	Unitas/Bidang Usaha Pemertanian Ditinjau dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Hasil Kegiatan) (Output)	Berkas Tahun 2025				Ceklist Pening	Prestasi Maju Bersama Tahun 2025	
			Lokasi	Tujuan Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Paga Indikator	Sumber Data		Tujuan Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Paga Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.00.00.2.00	Pembangunan Pariwisata Desa Polek, Hutan, Sawah, dan Ekowisata serta Organisasi Kewasparwihan Kecamatan Kumpang Koro	Terlaksananya Berkas Pengembangan Gender (PUG) Pada Lembaga Perempuan Kecamatan Kumpang Koro			62.877.866				62.794.454
2.00.00.2.00.00	Adaptasi Ketahanan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak, Hutan, Swah dan Ekowisata	Jumlah kegiatan pengembangan/potensi hutan swah media yg dibuatkan dan dibagikan dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di desa polek, hutan, swah dan ekowisata	Hasil Maju Berkas		62.877.866	Data Akadik Desa (DAK) DAK yang dibuatkan Pengembangan Sistem Peningkatan			62.794.454
1.00.00.2.00	Pengukuran dan Pengembangan Lembaga Perempuan Layanan Pembangunan Kecamatan Kumpang Koro	Jumlah Lembaga dan Persepsi LK/LK/LK Pembangunan Peningkatan			62.877.866				62.877.866
2.00.00.2.00.00	Pengembangan Kegiatan Layanan Daya Lembaga Persepsi Layanan Pembangunan Kecamatan Kumpang Koro	Jumlah lembaga Daya Layanan Perempuan Layanan Pembangunan Kecamatan Kumpang Koro yang Mendukung Peningkatan Kecamatan	Hasil Maju Berkas	2 Lembaga	62.877.866	Data DAK Hutan (DAH) Data Akadik Desa (DAK) DAK yang dibuatkan Pengembangan Sistem Peningkatan		2 Lembaga	62.877.866

Kode	Uraian Bidang Usaha Pemasarisan Darah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Berkas Tahun 2015				Ceklist Pening	Prestasi Masi Keluarga Tahun 2015	
			Laki-laki	Tarigan Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Paga Indikasi	Sumber Data		Tarigan Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Paga Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Desa/kelompok komunitas KampungKesehatan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Desa/kelompok KampungKesehatan yang Tersebut	Rak. Buku Buku	42 Dokumen	125.347.300	Data Reg. Hasil (DRH) Data Akreditasi Gawat (DAG) DAG yang Diterima PenggunaKesehatan Saling Pelayanan		42 Dokumen	125.717.200
1.05.01	PROGRAM PROMOSI DAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan layanan		15 keluarga	212.707.300			15 keluarga	212.688.100
1.05.01.2.02	Pengembangan dan Pengembangan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kesehatan Masyarakat KIE dan KIE Anak yang Melayan Kegiatan dalam Darah KampungKesehatan	Jumlah Yang Menerima Layanan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga		10 orang	212.707.300			10 orang	212.688.100
1.05.01.2.03.02	Peningkatan Kualitas Layanan Daya Laidada Pelayanan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Target Darah KampungKesehatan	Jumlah Kualitas Daya Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkanPeningkatan Kualitas Keluarga KampungKesehatan	Rak. Buku Buku	1 keluarga	212.707.300	Peningkatan Yang Ada dan Diterima (PAG) Data Reg. Hasil (DRH) Data Akreditasi Gawat (DAG) DAG yang (Diterima)		1 keluarga	212.688.100

Kode	Uraian Bidang Usaha Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Keluaran) (Output)	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Pencapaian Madya Rencana Tahun 2015	
			Lokasi	Tetapan Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Pagu Indikator	Sumber Dana		Tetapan Capaian Kinerja	Kebijakan Data/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penggunaan Batas Pembelian			
3.08.06	PROGRAM PEMENDAHAN KUK KUK (KUK)	Pelayanan Pemenuhan Infrastruktur Kabupaten Layang Layang		90%	271.000.000			90%	261.330.770
3.08.06.2.01	Pembinaan PIR pola Lumbung Pemerintah, Non pemerintah, dan Dukit Usaha Kewirausahaan Kewirausahaan	Jumlah Lumbung Pemerintah, Non pemerintah, dan Dukit Usaha Kewirausahaan Kewirausahaan yg mendapat pelatihan KUK		1 MTDK	271.000.000			1 MTDK	261.330.770
3.08.06.2.01.01	Adiklat pelatihan dan Pembinaan PIR pola Lumbung Pemerintah, Non Pemerintah, Madya dan Dukit Usaha Kewirausahaan Kewirausahaan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Madya dan Dukit Usaha yang mendapat pelatihan Kewirausahaan dan Pembinaan PIR pola Lumbung Pemerintah, Non Pemerintah, Madya dan Dukit Usaha	Rp. Dukit Dukit	10 organisasi	271.000.000	Dana Abadi Usaha (DAU) DAU yang diterima Penggunaan Batas Pembelian		10 organisasi	261.330.770
	TOTAL				11.458.565.144				11.073.163.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2025 melakukan 7 program, sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 - a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 1) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 2) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - 1) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Makanan
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
5. PROGRAM PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 - a. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 - a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja ini memuat informasi tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, capaian program dan kegiatan, serta capaian Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun sebelumnya.

Adapun keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dan program kegiatan yang sudah disusun dalam Renja 2025 ini menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja 2025 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendatang.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun 2025 disusun, dengan harapan dapat terimplementasi dengan maksimal dan berhasil.

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara**



**NUR RAHMAN, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda, I/IV.c
NIP. 19720617 199203 1 002**